

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman globalisasi yang serba modern dan canggih peranan seluruh sektor sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini tidak terkecuali peranan dari sektor ekonomi. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya setiap negara pasti memiliki strategi pembangunan di sektor perekonomiannya. Untuk mencapainya, diperlukan sebuah institusi atau lembaga yang bertindak selaku penyelenggara regulasi. Yang menjadi penyelenggara regulasi keuangan di Indonesia adalah lembaga keuangan, misalnya lembaga keuangan bank yang bertindak selaku lembaga yang menyediakan dana untuk investasi. (Sudirman, 2013:1).

Sebagai sarana yang cukup diperlukan pada peradaban masyarakat modern, sistem keuangan memiliki tugas utama yaitu sebagai wadah yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada peminjam untuk membeli barang dan jasa atau untuk investasi sehingga kegiatan ekonomi mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu, sistem keuangan menawarkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian dan kehidupan masyarakat. (Abdullah dan Wahjusaputri, 2018:1).

Bank merupakan institusi bisnis yang melakukan penyimpanan uang dari rakyat dan memberikannya kembali kepada rakyat berupa kredit atau dalam wujud lain guna menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan di Indonesia disebutkan jika perbankan terbagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Secara global, perbankan mempunyai tiga aktivitas utama, yakni menyimpan dana (*funding*), memberikan dana (*lending*) dan menawarkan layanan lainnya (*services*). Adapun aktivitas pokok perbankan yaitu

menyimpan dan memberikan dana sedangkan memberikan jasa lainnya merupakan kegiatan pendukung. Dalam melakukan kegiatan menghimpun dana, bank menawarkan tiga jenis simpanan yang berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*). Bank dapat dikatakan sebagai *Financial Intermediary* karena dapat dijadikan sebagai lembaga yang menjembatani kegiatan penyimpanan dana dan penyaluran dana. Sementara itu, layanan bank lainnya diperuntukkan sebagai penyokong keberhasilan aktivitas pokok bank. (Amelia, et al, 2019:29).

Bank Konvensional merupakan bank yang melaksanakan aktivitas bisnisnya berdasarkan prinsip konvensional yang terbagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Penjajahan Belanda memberikan andil yang cukup penting bagi perkembangan perbankan konvensional di Indonesia diantaranya *De Javasche Bank*, *De Post Paar* serta bank nasional lainnya seperti Bank Nasional Indonesia. Perbankan Indonesia sudah berkembang dizaman kemerdekaan baik itu bank pemerintah maupun bank swasta. (Dariana, 2014:613).

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bank konvensional memiliki kegiatan utama yakni sebagai pelaksana aktivitas bisnis menurut prinsip konvensional yang kegiatannya memberikan jasa pada lalu lintas pembayaran. Saat melakukan pencarian laba dan menetapkan harga kepada para pelanggannya, bank konvensional memakai dua cara, yakni: pertama, menentukan bunga menjadi biaya, baik bagi fasilitas simpanan berupa tabungan, giro dan deposito berjangka ataupun fasilitas pinjaman yang diberikan bersumber pada suku bunga tertentu. Penetapan harga ini disebut dengan *spread based*. Kedua, bagi layanan lainnya, bank mengaplikasikan bermacam tarif dalam jumlah atau persentase tertentu. Metode penetapan harga ini disebut sebagai *fee based*. (Jahja dan Iqbal, 2012:340).

Bank konvensional menyediakan berbagai macam produk perbankan guna melayani kebutuhan masyarakat. Adapun fasilitas pembiayaan bank konvensional dikenal dengan istilah kredit. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 diuraikan jika kredit merupakan pengalokasian uang maupun piutang yang setara dengan itu sesuai dengan kesepakatan pinjam meminjam diantara bank dan bagian lain, yang mengharuskan debitur memenuhi kewajibannya pada periode waktu tertentu melalui bunga yang diserahkan. (Fatriani, 2018:220).

Pada awal didirikannya di Indonesia PT BNI (Persero), Tbk dijadikan menjadi Bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” bersumber pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, BNI diresmikan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya dirubah menjadi Bank Umum Milik Negara berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968. Menurut UU No. 17 tahun 1968 mengenai Bank Negara Indonesia 1946 disebutkan kalau BNI berperan sebagai bank yang diberi mandat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta berkontribusi pada pembangunan nasional. Sekarang, 60 persen saham yang dimiliki BNI dikuasai Negara Indonesia, sementara itu residunya diklaim masyarakat umum, perorangan ataupun organisasi, baik lokal maupun asing. Jika dilihat dalam hal total aset, total kredit dan total dana pihak ketiganya BNI tercatat sebagai Bank nasional terbesar ke-4 di Indonesia. Dalam pemberian layanan keuangan terpadu, BNI ditunjang dengan berbagai anak perusahaan, salah satunya BNI Syariah . (bni.co.id, 2021).

Guna memperluas jaringannya PT BNI (Persero), Tbk membuka cabang maupun cabang pembantu diseluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dengan membuka Kantor Cabang BNI 46 yang pertama di Kota Padang di Jl. Dobi No.1 Padang Barat, perluasan ini bertujuan untuk menarik minat nasabah maupun investor untuk

berinvestasi pada bank mereka. Dalam meningkatkan pangsa pasar PT BNI (Persero), Tbk Cabang Padang memperbanyak kantor cabang yang dimiliki salah satunya dengan mendirikan KCU di Jl. Proklamasi No. 45 Kota Padang.

Salah satu produk kredit konsumen khusus pembelian yang dimiliki Bank Negara Indonesia adalah KPR bersubsidi. KPR bersubsidi merupakan bentuk kerjasama pemerintah lewat Kementerian PUPR dengan beberapa bank-bank plat merah di Indonesia. Sebagai salah satu bank plat merah, Bank Negara Indonesia berupaya untuk senantiasa mendukung program pemerintah guna mewujudkan rumah hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu usaha yang telah dilaksanakan Bank Negara Indonesia khususnya untuk wilayah kota padang adalah dengan melakukan akad kredit massal kepada debitur KPR bersubsidi. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan percepatan penyaluran KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selama tiga tahun terakhir perkembangan KPR Bersubsidi khususnya di kota padang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah debitur KPR bersubsidi pada pelaksanaan akad kredit.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis tertarik membahas judul **“PROSES PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERSUBSIDI PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk CABANG PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut latar belakang diatas, jadi penulis dapat merumuskan masalah diantaranya :

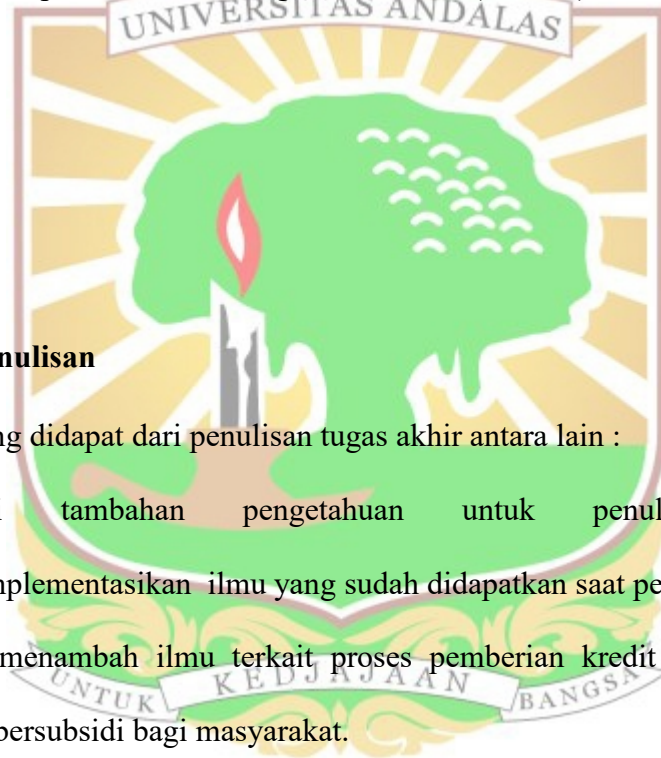
1. Bagaimana proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang?

2. Bagaimana perkembangan dari kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang.
2. Untuk mengetahui perkembangan dari kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang.



1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat yang didapat dari penulisan tugas akhir antara lain :

1. Sebagai tambahan pengetahuan untuk penulis dan bisa mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan saat perkuliahan.
2. Untuk menambah ilmu terkait proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi bagi masyarakat.

1.5 Metode Pengamatan

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Utama Padang selama 40 hari kerja.

1.5.1 Jenis dan Sumber Data

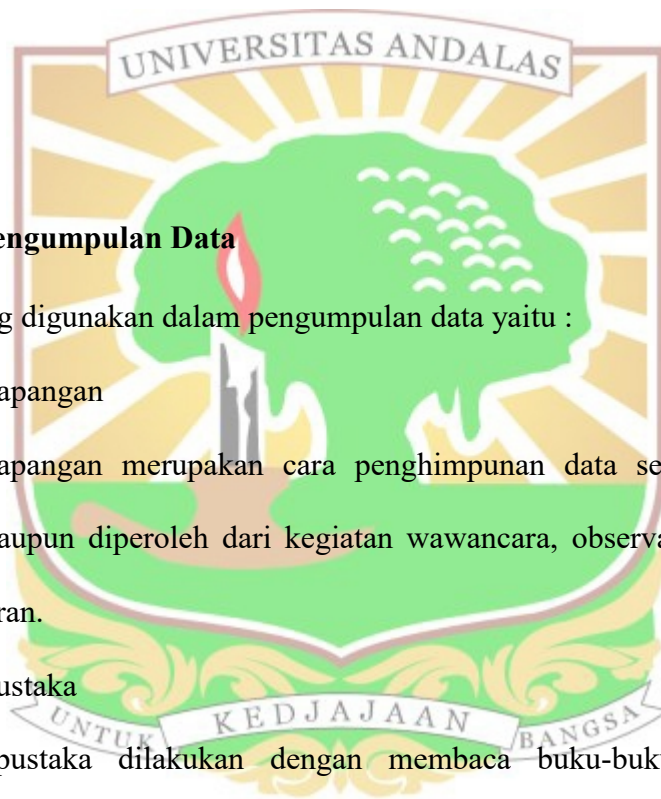
Jenis data yang dipakai pada pengamatan ini ialah :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari pegawai dan pejabat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat peneliti melalui sumber yang telah ada. Umumnya berbentuk bukti, catatan yang sudah disusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun tidak.



1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara penghimpunan data secara langsung ke lapangan ataupun diperoleh dari kegiatan wawancara, observasi maupun dalam bentuk laporan.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang berhubungan dengan penulisan laporan guna melengkapi data yang didapat dari lapangan sebagai landasan teori yang terkait masalah pada objek penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, metode pengamatan dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka, uraian kualitatif dan permasalahan lainnya yang menjadi pemikiran dalam pembuatan laporan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN : Menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah dan perkembangan perusahaan, susunan organisasi, serta bentuk kegiatan bisnis bank.

BAB IV PEMBAHASAN : Pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang.

BAB V PENUTUP : Mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk cabang Padang.

